BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang partisipasi politik. menurut Herbert McClosky (dalam Gatara 2008:309) partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budiardjo (2008, 367) menyatakan bahwa :

"Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *(contacting)* atau melobi *(lobbying)* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya."

Menurut Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson (dalam Gatara, 2008) dalam *No Easy Choice : Political participation in developing* :

"partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap dan sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif."

Dengan demikian, Pengertian ini dibatasi beberapa hal, yaitu:

1. Partisipasi hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi

lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tesebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.
2. Partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hali ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan professional dibidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
3. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik.
4. Partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan ke pemerinah.

Partisipasi politik menurut Kevin R Hardwice (dalam Gatara, 2008:310) mendefinisikan "partisipasi memberi perhatian kepada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut".

Dari pendapat yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan *(violence).*

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Beberapa ahli juga menyampaikan pendapat mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti (2010, 184-185) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, yaitu :

1. Kesadaran Politik
   Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah (sistem politik)
   Kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.
3. Status Sosial
   Yang dimaksud dengan status sosial ialah pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik seperti kedudukan seseorang dalam masyarakt karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan.
4. Status Ekonomi
   Status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran ataupun kepemilikan benda-benda berharga.

seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut, status sosial dan ekonomi. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara atau *intervening variabels*. Lalu,partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.

Selanjutnya menurut Myron Weimer (dalam Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews 2011:56-57) partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi

Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komensisalisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

   Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern.

   Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalism, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

   Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untyuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

   Meluasnya ruang lingkup aktivis pemrintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath (dalam Michael Rush dan Althof (2005:165) memberikan alasan bervariasi, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan rangsangan politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relative cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demoratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku dan partisipasi politik.

Dan menurut Arbi Sanit (dalam Suharno 2004, 110). Ada enam faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan
   Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit tentang politik, maka ia akan acuh terhadap politik.
2. Pekerjaan Masyarakat
   Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik atau malah menjadi lebih jauh dari partisipasi politik.
3. Tingkat Pendidikan
   Bagi pemilih yang buta huruf, akan sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung.
4. Peran Aparat Pemerintah
   Pemerintah harusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik.
5. Pengaruh Kaum Intelektual
   Banyak diantara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media.
6. Konflik diantara Pemimpin Politik
   Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya.

2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik menurut para ahli. Rahman (2007,287) menyatakan bahwa :

”Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk

menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Gabriel Almond (dalam Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews 2011:57-58) membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yakni:

"Pertama, partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pemberian suara (voting), diskusi publik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Kedua, partisipasi secara non-konvensional, artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. Dapat dilihat dari tindakan pengajuan petisi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), serta perang gerilya dan revolusi."

(Rahman H.I, 2007:288) Perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorentasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Sementara menurut Milbrath dan Goel (dalam Cholisin 2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

1. Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, yaitu berupa orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilu
3. Gladiator, yaitu orang-orang yang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.

4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan bupati dan wakil bupati)

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pemilihan bupati dan wakil bupati, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan bupati dan wakil bupati adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi perwakilan. Artinya bahwa rakyat tidak secara langsung mengartikulasi berbagai

kepentingannya kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkannya pada sejumlah kecil orang tertentu. Ide Pilkada langsung dinilai sebagai wujud demokrasi langsung (Ahmad Nadir 2005:15-17).

Dengan diadakannya pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung, merupakan salah satu wujud untuk mencapainya demokrasi karena masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya dengan bebas tanpa harus ikut campurnya DPRD untuk memilih kepala daerah lagi, dengan adanya pemilihan bupati dan wakil bupati ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum, untuk membuat masyarakat lebih melek kepada calon-calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati.

2.5 Hasil penelitian yang relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian lanjutan dalam proposal penelitian ini, penulis sudah terlebih dahulu membaca beberapa dari hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan penelitian yang sama. Ada pun penelitian terdahulu yang membahas mengenai perilaku politik, Yaitu:

1. Skripsi oleh Hendrik tahun 2019 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Peruandalam Kecamatan Tayan Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018”. Penelitian ini menggunakan teori Budiardjo (2008,367). Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada

teori. Penelitian ini menggunakan teori Budiardjo (2008, 367) sedangkan peneliti menggunakan penelitian Ramlan Surbakti (2010, 184-185). Pada penelitian ini partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam sangat rendah, dengan tingkat partisipasi hanya 59,1%, yang tidak menggunakan hak pilih sekitar 40,9%.

2. Tesis oleh Panji Surianto tahun 2018 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik pada Pemilihan bupati dan wakil bupati Serentak di Kabupaten Karo tahun 2015". Penelitian ini menggunakan teori Miriam budiardjo. Dan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Karo meningkat, pada tahun 2010 tingkat partisipasi hanya 66, 13%, sedangkan pada tahun 2015 partisipasi masyarakat Kabupaten Karo mencapai 70,37%. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif.
3. Skripsi oleh Ferdi Exandy tahun 2021 dengan judul "Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Matan Hilir Utara pada Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2020". Dalam penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat Matan Hilir Utara pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 dan 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan, tingkat partisipasi masih sangat rendah. Pada penelitian menggunakan teori ramlan surbekti (2010, 184-185). Jenis penelitian yang di gunakan pada skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penulis yaitu pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Matahn Hilir Utara, sedangkan lokasi penelitian penulis dilaksanakan di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong.

2.6 Alur pikir penelitian

Pada Pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini partisipasi masyarakat di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang meningkat dari pada 5 tahun yang lalu yaitu pada Pemilihan bupati dan wakil bupati 2015. Walaupun partisipasi meningkat Desa Padang masih belum mencapai target KPU Kabupaten Ketapang, dan menjadi Desa yang memiliki jumlah suara dan tingkat partisipasi politik paling rendah di Kecamatan Benua Kayong. Ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pada bagian ini penulis mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target KPU Kabupaten Ketapang dalam partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tahun 2020.

Alur pikir penelitian ini menggunakan teori Ramlan Surbakti (2010, 184-185) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, yaitu :

1. Kesadaran Politik

   Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara. Salah satu yang mengakibatkan masyarakat tidak

berpartisipasi dalam pemilihan pada faktor kesadaran politik di akibatkan kurangnya sosialisasi dari KPU tentang pentingnya berpartisipasi untuk menentukan pemimpin, serta perangkat desa sekalu aparatur desa atau penyambung tangan dari KPU kepada masyarakat di Desa Padang untuk melakukan sosialisasi.

2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah (sistem politik)

   Kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Pada faktor ini salah satu yang mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilihan di akibatkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, seperti masyarakat sudah tidak percaya terhadap visi dan misi para calon pada saat masa kampanye karena visi dan misi pada saat kampanye hanya di ucapkan, sedangkan pada prakteknya berbeda ketika para calon terpilih.

3. Status Sosial

   Pengaruh status sosial terhadap partisipasi politik seperti kedudukan seseorang dalam masyarakt karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Pada faktor ini meliputi aspek pendidikan, keturunan, dan pekerjaan, salah satu yang mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilihan di akibatkan oleh aspek pekerjaan dari masyarakat, karena masyarakat beranggapan pekerjaan lebih utama dan lebih penting dari pada memilih seorang pemimpin, padahal suara

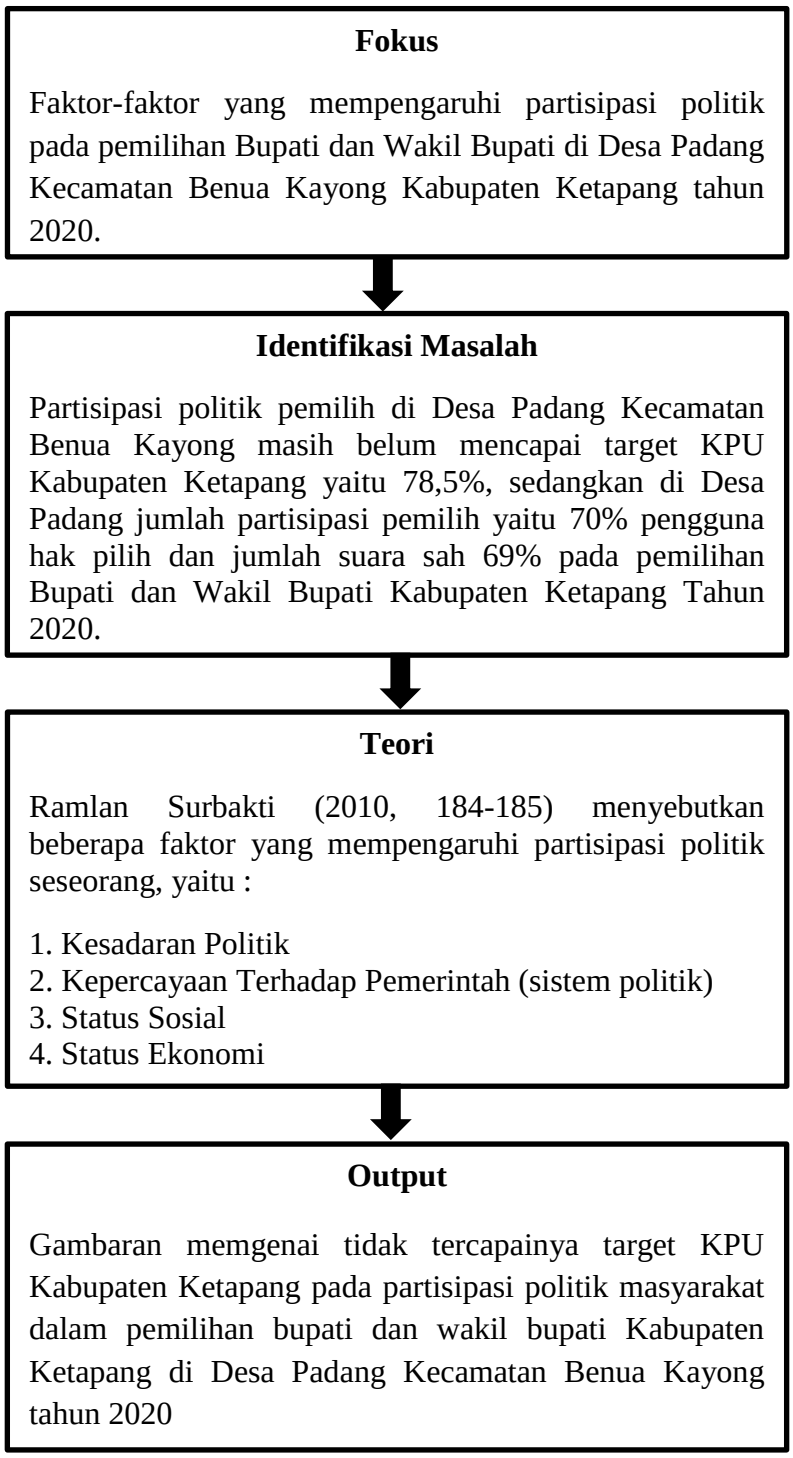
masyarakat pada pemilihan sangat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan di daerahnya.

4. Status Ekonomi

   Status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran ataupun kepemilikan benda-benda berharga dan domisili penduduk. Pada faktor ini yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dala pemilihan di akibatkan faktor domisili penduduk, ini berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan masyarakat yang mungkin jauh dari domisili mereka. Masyarakat yang sedang bekerja atau sedang menempuh pendidikan diluar tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilhan karena mereka tidak berada di daerah domisili mereka pada saat pemilihan berlangsung.

Gambar 2.4.

Alur Pikir Penelitian



Sumber: *diolah peneliti 2022*

2.7 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan permasalahan penelitian yang telah dibahas di atas, maka peneliti dapat membuat pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tahun 2020. Terdapat beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah faktor kesadaran politik mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tahun 2020?
2. Apakah faktor kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang tahun 2020?
3. Apakah faktor status sosial seperti pekerjaan dan pendidikan mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapan tahun 2020?
4. Apakah faktor status ekonomi mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Padang Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapan tahun 2020?